

***THE INFLUENCE OF REGIONAL EXPENDITURE AND POLITICAL
COMPETITION ON DISCLOSURE OF INTERNET FINANCIAL REPORTING
(IFR) AT REGENCIES/CITIES IN WEST JAVA***

**PENGARUH BELANJA DAERAH DAN KOMPETISI POLITIK TERHADAP
PENGUNGKAPAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR)* PADA
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT**

Santi Nurhunah¹,Dedi Mulyadi², Yanti³

Program Sudi Akuntans, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan
Karawang

ak19.santinurhunah@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of regional spending and political competition on Internet Financial Reporting Disclosures. There are 2 hypotheses tested namely (1) There is an influence between regional spending on disclosure of Internet Financial Reporting (2) There is an influence between political competition on disclosure of Internet Financial Reporting. The sample used in this study amounted to 135 districts/cities in West Java in 2017-2021. The sampling technique uses saturated sampling. Data processing in this study utilizes PLS-SEM on SmartPLS 4.0 software. The results of this study are (1) Regional spending effect on disclosure of Internet Financial Reporting in districts/cities in West Java Province (2) Political Competition effect on disclosure of Internet Financial Reporting in districts/cities in West Java Province Both hypotheses in this study are proven and accepted.

Keywords: *Regional Expenditure, Political Competition and Disclosure of Internet Financial Reporting*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja daerah dan kompetisi politik terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Terdapat 2 hipotesis yang diuji yakni (1) Terdapat pengaruh antara belanja daerah terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (2) Terdapat pengaruh antara kompetisi politik terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 135 kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2017-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Pengolahan data dalam penelitian ini memanfaatkan PLS-SEM pada perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* pada kabupaten/kota di Jawa Barat (2) Kompetisi Politik berpengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* pada kabupaten/kota di Jawa Barat . Kedua Hipotesis dalam penelitian ini terbukti dan diterima.

Kata Kunci: *Belanja Daerah, Kompetisi Politik dan Pengungkapan Internet Financial Reporting*

PENDAHULUAN

Reformasi sistem pemerintahan merupakan aspek yang paling menarik, fenomena ini dibuktikan dengan perubahan dalam revisi konstitusi pemerintahan secara terus menerus (Wahyuningsih & Wijayanti, 2022). Revisi terakhir dilakukan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintahan Daerah yang menjadi jalan bagi sistem pemerintahan baru dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi (Nur Probohudono et al., 2021). Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi mengakibatkan pemerintah provinsi memiliki kewajiban yang besar dalam mengelola roda pemerintahannya sendiri (Lestari & Rahardjo, 2020).

Pada era globalisasi informasi, Indonesia dilibatkan menjadi anggota dari masyarakat informasi dunia sehingga diperlukan penetapan peraturan sehubungan dengan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional dengan tujuan agar peningkatan teknologi informasi dapat dilaksanakan dengan maksimal dan merata ke seluruh kalangan masyarakat (Yunita et al., 2022). Selama beberapa dekade terakhir perkembangan teknologi informasi telah memberikan terobosan baru dalam menyelesaikan pekerjaan termasuk pada sektor pemerintahan (Indris et al., 2018; Suryta & Nugroho, 2022). Pemerintah daerah dapat menggunakan internet dalam penyajian laporan keuangannya (Yunita et al., 2022). Proses digitalisasi dalam pengelolaan dokumen tersebut tidak sekedar memindai dokumen saja, tetapi juga memudahkan dalam proses pencarian data dan proses distribusi yang cepat tersebar (Armandani & Mulyadi, 2021). Pengungkapan atau pelaporan keuangan sektor publik melalui media website resmi pemerintah daerah (*e-government*) disebut dengan *Internet*

Financial Reporting (Mutiha, 2020). Sistem berbasis web dari sistem ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen yang lebih baik dan terarah sehingga mampu menghasilkan laporan yang terintegrasi serta terpusat (Yanti & Nurlaelasari, 2022).

Transparansi di Indonesia berkembang pesat karena adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadikan semua deretan pegawai pemerintah lebih transparan, bertanggung jawab dan mengarah pada pelayanan terbaik bagi masyarakat (Dewi & Adi, 2019). Wilayah Provinsi Jawa Barat memperoleh skor terbesar pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2022 dengan skor 81,93 (Pemda Jabar, 2022). Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2004-2022 juga menjadi provinsi terbanyak tindak pidana korupsi dengan total 132 kasus (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Transparansi dalam penyelenggaraan keuangan daerah yang belum maksimal menimbulkan banyaknya dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan politik daerah (Astuti & Pertiwi, 2022). Pemerintah daerah hanya cenderung pada pemenuhan kewajiban membuat website resmi tanpa benar-benar ingin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Dewi & Adi, 2019).

Belanja daerah dapat menjadi faktor utama untuk melihat kemana pendapatan dibelanjakan (Nor et al., 2021). Pemerintah daerah dengan belanja daerah yang tinggi akan membuktikan kepada publik bagaimana hasil kinerja mereka (Azis & Hapsari, 2020). Penelitian Putri & Setiawan (2022) menunjukkan bahwa belanja daerah pada dasarnya mempengaruhi IFR, dimana anggaran belanja yang tinggi seharusnya mendesak pemerintah daerah setempat untuk lebih transparan

dalam pengelolaan anggaran belanja mereka. Penelitian Masra & Sari (2020) dan Nor et al (2021) mendukung pendapat tersebut bahwa belanja daerah mempengaruhi *Internet Financial Reporting (IFR)*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuni & Sari (2022) dan Azis & Hapsari menunjukkan bahwa belanja daerah tidak memengaruhi pengungkapan laporan keuangan di situs pemda dan *internet financial reporting*. Belanja daerah yang tinggi tidak mendukung pemda dalam peningkatan pengungkapan informasi keuangan pada masing-masing situs pemda (Yuni & Sari, 2022).

Penelitian Sofyani & Dwirama (2019) menunjukkan bahwa kompetisi politik memiliki pengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Menurut Sofyani & Dwirama (2019) persaingan politik yang ketat menyebabkan tuntutan akan transparansi informasi keuangan daerah semakin besar. Hal ini didukung oleh penelitian Sutaryo & Amanu (2020) dimana persaingan politik mempengaruhi tingkat transparansi informasi pada situs pemerintahan daerah. Sedangkan penelitian Mutmainnah et al (2023), Hadianto & Murtin (2020) dan Yunita et al (2022) tidak menunjukkan adanya pengaruh kompetisi politik terhadap *Internet Financial Reporting*. Kepala daerah dapat terdorong untuk meningkatkan transparansi anggaran melalui situs resminya terlepas dari tingkat kompetisi politik daerah (Mutmainnah et al., 2023).

Sudah banyak penelitian mengenai *Internet Financial Reporting (IFR)* akan tetapi penelitian yang berhubungan dengan kompetisi politik masih terbatas. Penelitian ini masih perlu untuk dikaji kembali mengenai isu-isu kompetisi politik yang mempengaruhi pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)*. Berdasarkan

pembahasan diatas, penelitian ini bermaksud mengkaji mengenai: Faktor – faktor apa yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)* Pemerintah Daerah di Jawa Barat selama periode 2017 - 2021 ?

Teori Stewardship

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. *Theory stewardship* digambarkan sebagai pemerintah yang memiliki hubungan dengan masyarakat sebagai *principal* (Sofyani & Dwirama, 2019). Berkaitan dengan pemerintahan, pemerintah berfungsi sebagai pelayan dimana mereka memiliki lebih banyak informasi, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, dan harus selalu sadar menjaga transparansi dan akuntabilitas (Arifin, 2020). Menurut landasan psikologis dan sosiologis teori *stewardship* mengutarakan bahwa penerima mandat (*steward*) akan menjalankan tanggung jawabnya untuk menggapai tujuan organisasi sebagai wujud pelaksanaan mandat pemilik modal (*principal*) (Finakesti et al., 2022). Tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan pemerintahannya (Arifin, 2020).

Teori *steward* membuktikan bahwa *principal* sebagai pendorong struktur tata kelola yang memberdayakan dan memotivasi perilaku pro-organisasi *steward* akan menghasilkan peningkatan kinerja (Ghozali, 2020). Hal tersebut karena *stewardship* berhubungan dengan karakter manusia yang mampu bertanggungjawab, dipercaya, integritas dan jujur pada pihak lainnya (Hardiningsih et al., 2021). Kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi memiliki hubungan yang erat dalam teori *stewardship* (Sofyani & Dwirama,

2019). Oleh karena itu, kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi akan dipenuhi dengan adanya kesuksesan organisasi tersebut (Hardiningsih et al., 2021).

Steward dan principal dalam hubungannya dengan akuntansi sektor publik dirancang untuk mencukupi keperluan informasi (Sofyani & Dwirama, 2019). *Stewardship Theory* berpendapat bahwa manajemen sebagai pihak yang dapat mengambil tindakan maupun keputusan terbaik untuk kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan *stakeholder* pada khususnya (Hardiningsih et al., 2021). Jika dihubungkan dengan pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)*, pemerintah sebagai *steward* bertanggungjawab atas semua sumber daya yang diamanahkan kepadanya dan bertanggungjawab atas terlaksananya *good governance* melalui pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah (Finakesti et al., 2022). Pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)* memudahkan klien atau pemegang kepentingan untuk mengakses dan memperoleh informasi keuangan melalui web (Putri & Setiawan, 2022).

Teori *stewardship* dapat digunakan untuk mengamati tindakan para pengelolaan keuangan daerah berhubungan dengan motivasi mereka dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kepentingan pemilik pemerintah daerah yaitu masyarakat (Asnida et al., 2021). Belanja daerah dipergunakan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat (Azis & Hapsari, 2020). Belanja daerah dapat dihubungkan dengan teori *stewardship* dengan alasan karena belanja daerah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi semua jenis aktualisasi perihal pemerintahan yang menjadi kekuasaan provinsi atau kabupaten/kota (Putri & Setiawan, 2022). Pemerintah daerah

(*steward*) akan mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya untuk melayani *stakeholder* yaitu masyarakat (Pranaswati & Kriswanto, 2020).

Teori *stewardship* diartikan sebagai para manajer yang tidak termotivasi oleh kepentingan individu tetapi lebih ditujukan pada kepentingan organisasi (Asnida et al., 2021). Persaingan politik dan teori *stewardship* dapat dikaitkan sedemikian rupa sehingga kepala daerah yang bertindak sebagai pengurus akan berperilaku sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan bersama karena *steward* percaya bahwa kepentingan bersama lebih penting dan mengutamakan tujuan organisasi dari tujuan individu (Pranaswati & Kriswanto, 2020). Kepala daerah (*steward*) dengan sadar akan bekerja dengan optimal untuk memberikan pelayanan kepada para *stakeholder* (masyarakat) yang telah memberikan mandat kepadanya (Pranaswati & Kriswanto, 2020).

Internet Financial Reporting (IFR)

Pelaporan keuangan daerah digunakan pemerintah daerah sebagai media penyampaian beragam informasi dan mengukur secara ekonomi berkaitan dengan kinerja serta sumber daya yang ada kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut (Kurniati & Siddi, 2020). Pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*) dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu laporan keuangan yang disertai dengan penyampaian informasi secara lengkap sesuai kebutuhan pengguna (Finakesti et al., 2022). Pengungkapan laporan keuangan ini bermaksud agar informasi yang tersedia bermanfaat untuk mencapai target pelaporan keuangan dan pelayanan terhadap pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda (Putri & Setiawan, 2022). Wujud dari pertanggungjawaban kepada masyarakat

dilakukan melalui publikasi laporan keuangan melalui internet atau *Internet Financial Reporting* yang menjadikan masyarakat dapat memperoleh informasi secara efisien, cepat dan murah (Nufus et al., 2019).

Pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)* aksesibilitas laporan keuangan yang berarti memudahkan klien atau pemegang kepentingan untuk mendapatkan informasi keuangan yang disajikan dalam web (Putri & Setiawan, 2022). Penerapan *internet financial reporting (IFR)* harus terus didorong sebagai wujud transparansi pemerintah agar tatanan tata kelola menjadi semakin relevan dan kredibel (Astuti & Pertiwi, 2022). Selain itu, publikasi informasi keuangan melalui website resmi pemerintah daerah juga bermanfaat untuk meminimalisir asimetri informasi keuangan dengan pihak eksternal (Hanafi & Wadi, 2021). Kesadaran akan hal ini menjadi usaha untuk mewujudkan diri sebagai pejabat yang taat ataupun sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan (Anggara & Cheisviyanny, 2020).

Belanja Daerah

Belanja daerah dapat diartikan sebagai pengeluaran yang menjadi kewajiban pemda yang mengakibatkan jumlah kekayaan berkurang (Masra & Sari, 2020). Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer (Sholikhah & Priyono, 2022). Belanja daerah digunakan untuk memenuhi berbagai sarana dan prasana yang dibutuhkan publik melalui pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat (Azis & Hapsari, 2020). Jika saluran dengan benar, belanja daerah berperan penting dalam mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan perkembangan ekonomi pada suatu

negara atau daerah (Winangsih & Fathah, 2023).

Belanja daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat (Azis & Hapsari, 2020). Selain itu, belanja juga digunakan sebagai sarana informasi bagi masyarakat berkaitan dengan perwujudan pembangunan yang sekaligus dapat digunakan sebagai media pengendali dan akuntabilitas kinerja pemerintah (Winangsih & Fathah, 2023). Tingginya belanja daerah berhubungan dengan anggaran daerah yang semestinya membuktikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan dan menggunakan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Masra & Sari, 2020). Berdasarkan hal tersebut, semakin tinggi taraf pelayanan pemerintah daerah, seharusnya tekad pemerintah daerah juga semakin meningkat untuk mengungkapkan informasi belanja daerah dalam website resminya (Yuni & Sari, 2022).

Kompetisi Politik

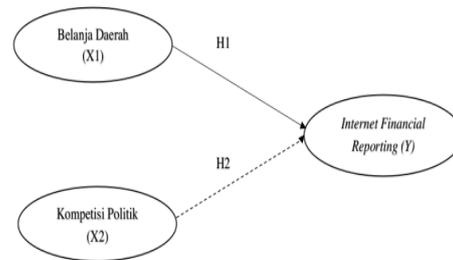
Kompetisi politik diartikan sebagai tingkat daya saing untuk menempati suatu jabatan penting pada pemerintahan (Utami et al., 2019). Partai politik adalah organisasi politik yang sengaja didirikan oleh sekumpulan penduduk Republik Indonesia atas dasar kesamaan maksud dan tujuan untuk mengupayakan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara dalam bersaing melalui pemilihan umum (Pranaswati & Kriswanto, 2020). Adanya susunan politik dianggap sebagai kekuatan politik pada suatu daerah yang meliputi bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan, bagaimana pengalokasiannya dan mengapa suatu partai tertentu memiliki kekuasaan yang lebih besar dari yang lain dalam keadaan tertentu (Annisa & Murtini, 2018).

Lembaga legislatif (DPRD) dapat diartikan sebagai lembaga yang

mempunyai kedudukan dan peranan penting berkaitan dengan pengendalian keuangan daerah yang bermanfaat untuk pengendalian kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Utami et al., 2019). Program kerja yang ditawarkan menjadi hal terpenting dalam sistem demokrasi yang sempurna untuk mengetahui sejauh mana setiap kandidat dapat mengambil hati rakyat (Perdana & Achmad, 2018). Banyaknya anggota yang berhasil terlibat dalam jabatan penting ini mengindikasikan adanya semangat yang besar dan tingkat pengawasan yang tinggi dalam memaksimalkan kinerja pemerintahan (Utami et al., 2019). Setiap anggota berusaha menjadi yang terbaik di mata rakyat, sehingga menyebabkan meningkatnya suasana persaingan yang ada di antara para anggota yang terlibat dalam pemilu (Perdana & Achmad, 2018).

Media pelaporan keuangan yang dipublikasikan melalui internet menjadikan daerah dengan persaingan politik yang tinggi cenderung menyajikan laporan keuangan di internet akibat pengawasan yang ketat oleh pesaing politiknya dibandingkan dengan daerah yang kompetensi politiknya rendah (Yunita et al., 2022). Hal tersebut karena pejabat cenderung merasa aman dalam situasi mereka, sehingga mereka tidak ingin menyajikan informasi lebih banyak ketika kompetisi politik rendah atau ketika terdapat partai yang dominan (Sutaryo & Amanu, 2020).

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Belanja Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting*

Belanja daerah memaparkan mengenai pengeluaran yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sehingga penting untuk diungkapkan (Sophi & Mayar, 2023). Semakin tinggi taraf layanan yang diberikan, maka tekad pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi layanannya melalui situs web akan semakin tinggi (Mutih, 2020). Penelitian Putri & Setiawan (2022) menunjukkan hasil bahwa belanja daerah mempengaruhi pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)* yang berarti bahwa pemda dengan belanja daerah yang besar akan menunjukkan dan membuktikan bahwa anggaran belanja telah dimanfaatkan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam meningkatkan derajat hidupnya. Penelitian Masra & Sari (2020) menyimpulkan bahwa belanja daerah mempengaruhi *Internet Financial Reporting (IFR)* oleh pemda. Belanja daerah yang tinggi menggambarkan tingginya taraf pelayanan pada suatu daerah yang otomatis akan mempengaruhi *Internet Financial Reporting (IFR)* pada pemda (Masra & Sari, 2020).

Penelitian Saraswati et al (2019) mendapatkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh secara signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemda di

internet. Masyarakat dapat mengetahui berapa jumlah dana yang dianggarkan melalui APBD yang telah dikeluarkan oleh pemda untuk melayani masyarakat (Saraswati et al., 2019). Hasil penelitian Priyastiwati & Saputra (2019) menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Selain itu penelitian Nor et al (2021) juga mendukung bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap transparansi anggaran melalui website resmi. Oleh karena itu akses informasi menjadi lebih mudah melalui transparansi pengungkapan informasi anggaran pada website resmi sebagai bentuk tanggungjawab dari pemerintah daerah kepada masyarakat (Nor et al., 2021). Berdasarkan pembahasan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 :Belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)* pemerintah daerah

Kompetisi Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting*

Upaya perwujudan diri sebagai aparat yang taat ataupun dengan tujuan politik dilakukan untuk memperoleh simpati dan kepercayaan publik sehingga dapat terpilih kembali pada pemilu berikutnya (Kurniati & Siddi, 2020). Kepercayaan tersebut membuat pemerintah tidak akan menjalankan tindakan yang dapat memicu masyarakat yang telah memilihnya kecewa (Pranaswati & Kriswanto, 2020). Pemerintah terpilih akan mendapat pengawasan dengan adanya persaingan politik yang tinggi (Marseille & Aswar, 2019). Teori diatas didukung oleh penelitian Sofyani & Dwirama (2019) yang menyatakan bahwa kompetisi

politik memiliki pengaruh positif terhadap IFR. Semakin tinggi kompetisi politik, semakin tinggi pula keinginan pemda untuk memanfaatkan internet sebagai media pengungkapan informasi keuangan yang mudah dan murah (Sofyani & Dwirama, 2019).

Penelitian Aronmwan & Asiriwuwa (2018) menyatakan bahwa kompetisi politik memiliki pengaruh positif terhadap IFR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak persaingan politik, maka akan semakin banyak pengungkapannya (Aronmwan & Asiriwuwa, 2018). Hasil pengujian dalam penelitian Perdana & Achmad (2018) menyimpulkan bahwa kompetisi politik berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas IFR pada pemda. Kemudahan akses IFR pada website resmi pemda ini, menunjukkan hasil kinerja mereka kepada para pengguna laporan keuangan, khususnya masyarakat (Perdana & Achmad, 2018).

Penelitian Sutaryo & Amanu (2020) menunjukkan hasil bahwa tingkat kompetisi politik memiliki pengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pada website pemerintah daerah. Penelitian Annisa & Murtini (2018) menjelaskan bahwa persaingan politik memiliki pengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah pada website resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan terdorong untuk lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan melalui website yang dimilikinya ketika persaingan politiknya tinggi (Annisa & Murtini, 2018)

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 :Kompetisi Politik berpengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)* pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diambil berupa data sekunder yang diambil dari website resmi Pemerintah Daerah dan website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2017-2021 berjumlah 135. Pengambilan sampel dilakukan dengan menerapkan metode sampling jenuh yang berarti menggunakan seluruh anggota populasi. Pengolahan data dalam penelitian ini memanfaatkan PLS-SEM pada perangkat lunak SmartPLS 4.0. Jenis pengolahan data yang digunakan pada penelitian yaitu statistik deskriptif, pengujian outer model, inner model dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptive Variabel Penelitian

Statistik deskriptif dalam penelitian diaplikasikan untuk memberikan gambaran mengenai data yang digunakan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

| Variabel | Indikator | N | Min | Max | Mean | Std. Dev |
|-------------------|-----------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Belanja Daerah | X1.1 | 135 | 510,347,957,568 | 5,521,703,558,330 | 2,400,766,965,507 | 1,201,240,871,043 |
| | X1.2 | 135 | 57,422,540,258 | 1,701,254,453,271 | 547,370,258,099 | 317,713,200,799 |
| | X1.3 | 135 | 0 | 1,409,487,609,776 | 336,622,124,034 | 296,257,087,766 |
| Kompetisi Politik | X2 | 135 | 25 | 55 | 47 | 6 |
| Pengungkapan IFR | Y | 135 | 0 | 8 | 3 | 3 |

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan pada tabel 1. statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa nilai maksimum dari variabel belanja daerah dengan indikator X1.1 sebesar 5,521,703,558,330 dan nilai minimumnya adalah 510,347,957,568. Nilai rata-rata dari variabel ini sebesar 2,400,766,965,507 sementara standar deviasinya adalah 1,201,240,871,043. Hasil standar deviasi yang menunjukkan

nilai kurang dari nilai mean berarti bahwa variabel belanja daerah dengan indikator belanja operasi memiliki data yang kurang bervariasi.

Berdasarkan pada tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa variabel belanja daerah dengan indikator X1.2 memiliki nilai maksimum sebesar 1,701,254,453,271 dan nilai minimum sebesar 57,422,540,258. Nilai rata-rata dari variabel ini sebesar 547,370,258,099, sedangkan standar deviasinya adalah 317,713,200,799. Hasil standar deviasi yang menunjukkan nilai kurang dari nilai mean berarti bahwa variabel belanja daerah dengan indikator belanja modal memiliki data yang kurang bervariasi.

Berdasarkan pada tabel 1. di atas dapat menunjukkan bahwa nilai maksimum dari variabel belanja daerah dengan indikator X1.3 ini sebesar 1,409,487,609,776 dan nilai minimumnya adalah 0. Nilai rata-rata dari variabel ini sebesar 336,622,124,034 sedangkan standar deviasinya adalah 296,257,087,766. Hasil standar deviasi yang menunjukkan nilai kurang dari nilai mean berarti bahwa variabel belanja daerah dengan indikator belanja transfer memiliki data yang kurang bervariasi.

Berdasarkan pada tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa nilai maksimum dari variabel kompetisi politik ini sebesar 55 dan nilai minimum dari variabel ini adalah sebesar 25. Nilai rata-rata dari variabel ini sebesar 47, sedangkan standar deviasinya adalah 6. Hasil standar deviasi yang menunjukkan nilai kurang dari nilai mean berarti bahwa variabel belanja daerah dengan indikator belanja transfer memiliki data yang kurang bervariasi.

Berdasarkan pada tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa variabel pengungkapan IFR memiliki nilai maksimum sebesar 55, dan nilai

minimumnya sebesar 25. Nilai rata-rata dari variabel ini sebesar 3, sedangkan standar deviasinya adalah 3. Hasil standar deviasi yang sama dengan nilai mean berarti bahwa variabel pengungkapan IFR memiliki data yang bervariasi.

Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis outer model digunakan untuk membuktikan bahwa indikator yang diterapkan cocok untuk digunakan (*valid dan reliabel*). Analisis outer model pada penelitian ini memakai tiga uji yaitu *Convergent Validity (Loading Factor)*, *Discriminant Validity*, *Average Variance Extracted (AVE)*, *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*.

a. Convergent Validity (Loading Factor)

Pengujian validitas konvergen menjelaskan bahwa suatu indikator merupakan pembentuk variabel laten. Penilaian indikator diterapkan atas dasar hubungan antara *item score* dengan *construct score* yang dihitung menggunakan *software SmartPLS 4.0*. Nilai *convergent validity* yang diharapkan adalah >0.70 .

Tabel 2. *Loading Factor*

| Item | Belanja Daerah | Kompetisi Politik | Pengungkapan IFR |
|------|----------------|-------------------|------------------|
| X1.1 | 0.744 | | |
| X1.2 | 0.798 | | |
| X1.3 | 0.844 | | |
| X2 | | 1.000 | |
| Y | | | 1.000 |

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa indikator penelitian mempunyai nilai *loading factor* lebih tinggi dari nilai *error variance* yaitu 0.70 artinya indikator dapat dinyatakan valid dan setiap indikator dapat merefleksikan model pengukuran terhadap variabel konstruk. Sehingga indikator dalam penelitian ini layak diikutsertakan dalam pengujian lebih lanjut.

b. Discriminant Validity

Pengukuran yang diterapkan pada pengujian ini menggunakan nilai *Heretroit-Monotrait Ratio (HTMT)* dimana nilai loading pada konstruk yang dituju harus menunjukkan nilai yang lebih besar dibanding nilai loading dengan konstruk yang lain. Nilai HTMT $<0,90$ berarti bahwa konstruk tersebut mempunyai validitas diskriminan yang baik.

Tabel 3. *Heretroit-Monotrait Ratio (HTMT)*

| | Belanja Daerah | Kompetisi Politik | Pengungkapan IFR |
|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Belanja Daerah | | | |
| Kompetisi Politik | 0.800 | | |
| Pengungkapan IFR | 0.147 | 0.047 | |

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa nilai loading pada konstruk yang dituju lebih tinggi dari nilai loading pada konstruk yang lain. Nilai Kompetisi Politik \rightarrow Belanja Daerah sebesar 0.800, nilai Pengungkapan IFR \rightarrow Belanja Daerah 0.147 dan Pengungkapan IFR \rightarrow Kompetisi Politik sebesar 0.047. Sedangkan konstruk atau variabel pada penelitian ini memiliki nilai HTMT $<0,90$.

c. Average Variance Extracted (AVE)

Pengujian *Average Variance Extracted (AVE)* harus mendapatkan nilai >0.50 . Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel belanja daerah memiliki nilai AVE 0.634, variabel kompetisi politik memiliki nilai AVE 1.000 dan variabel pengungkapan IFR memiliki nilai AVE 1.000. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel laten yang digunakan pada penelitian ini baik karena mempunyai nilai AVE >0.50 .

Tabel 4. Average Variance Extracted (AVE)

| | Average Variance Extracted (AVE) |
|-------------------|----------------------------------|
| Belanja Daerah | 0.634 |
| Kompetisi Politik | 1.000 |
| Pengungkapan IFR | 1.000 |

Sumber: Hasil olah data (2023)

d. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Uji composite reliability dan cronbach's alpha adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai reliabilitas konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* >0,70.

Tabel 5. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

| | Cronbach's Alpha | Composite Reliability |
|-------------------|------------------|-----------------------|
| Belanja Daerah | 0.755 | 0.838 |
| Kompetisi Politik | 1.000 | 1.000 |
| Pengungkapan IFR | 1.000 | 1.000 |

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan Tabel 5. menunjukkan hasil bahwa semua variabel laten mempunyai nilai composite reliability dan cronbach's alpha >0,70 sehingga semua variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan reliabel dan model penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Pengujian Inner Model (Evaluasi Model Struktural)

Analisis *inner model* digunakan untuk membuktikan bahwa model struktural yang dibangun kuat dan akurat. Model struktural (*inner model*) dievaluasi menggunakan prosentase variance berdasarkan nilai R².

a. Analisis R-Square

Nilai *R-Square* (R²) adalah tolak ukur variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan pada tabel 6. disimpulkan bahwa nilai r-square

dari variabel Pengungkapan IFR sebesar 0.067 artinya variabel independen belanja daerah dan kompetisi politik mampu menjelaskan variabel dependen pengungkapan IFR hanya sebesar 6.7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 6. Analisis Hasil R-Square

| | R-square | R-square adjusted |
|------------------|----------|-------------------|
| Pengungkapan IFR | 0.067 | 0.053 |

Sumber: Hasil olah data (2023)

Pengujian Hipotesis

Kriteria yang digunakan adalah t-statistik yaitu hipotesa diterima jika t-statistik >1,96 dan ditolak jika t-statistik <1,96. Selanjutnya, untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas yaitu Ha di terima apabila P-Values <0,05. Untuk melihat penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dilihat melalui *bootstrapping report*.

Tabel 7. Path Coefficient

| | Original sample (O) | Sample mean (M) | Standard deviation (STDEV) | T statistics ((O/STDEV)) | P values |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Belanja Daerah -> Pengungkapan IFR | -0.347 | -0.328 | 0.151 | 2.293 | 0.022 |
| Kompetisi Politik -> Pengungkapan IFR | 0.282 | 0.253 | 0.111 | 2.548 | 0.011 |

Sumber: Hasil olah data (2023)

Berdasarkan pada tabel 7 dapat dilihat bagaimana hubungan antar variabel yang diuraikan sebagai berikut :

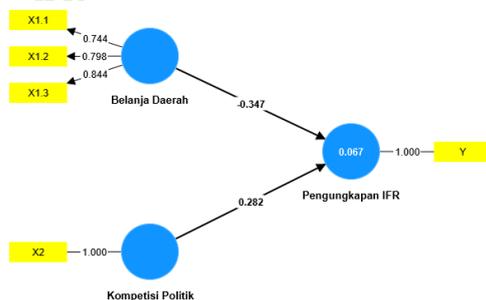
1. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)*

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan IFR. Hubungan variabel Belanja Daerah (X1) terhadap variabel Pengungkapan IFR (Y) adalah

sebesar -0.347 dengan nilai t -statistics sebesar 2.293 lebih besar dari 1.96 dan P -Values 0.022 sehingga memenuhi signifikansi pada alpha yaitu P -values $< 0,05$. Dengan demikian rumusan hipotesis H_a diterima, artinya belanja daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan IFR

2. Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)*

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa kompetisi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan IFR. Hubungan variabel Kompetisi Politik (X_2) terhadap variabel Pengungkapan IFR (Y) adalah sebesar 0.282 dengan nilai t -statistics sebesar 2.548 lebih besar dari 1.96 dan nilai P -Values 0.011 sehingga memenuhi signifikansi pada alpha yaitu P -values $< 0,05$. Dengan demikian rumusan hipotesis H_a diterima, artinya kompetisi politik berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan IFR



Sumber: Hasil Output SmartPLS (v.4.0)

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)*

Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pengungkapan IFR. Hasil dari pengujian tersebut dibuktikan dengan koefisien

nilai t - statistic $2,293$ nilai tersebut lebih $> 1,96$ dan P -Values sebesar 0.022 yang memenuhi signifikansi lebih < 0.05 . Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah belanja daerah kecil, maka pengungkapan IFR akan semakin tinggi. Sebaliknya jika pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mempunyai belanja daerah tinggi, maka pengungkapan IFR akan semakin rendah.

Pemerintah daerah dengan belanja daerah yang tinggi di kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2017-2021 mencerminkan tingkat pelayanan yang rendah. Pengungkapan IFR yang rendah terjadi karena publikasi informasi keuangan melalui media internet masih bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga tidak semua pemda mengungkapkan laporan keuangannya pada website resminya. Hal ini tidak sesuai dengan teori *stewardship* dimana seharusnya pemerintah sebagai *steward* bertanggungjawab atas semua sumber daya yang diamanahkan kepadanya dan bertanggungjawab atas terlaksananya *good governance* melalui pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah (Finakesti et al., 2022). Hal ini terjadi karena faktor sumber daya manusia kurang akan proses keterbukaan informasi yang seharusnya sampai kepada masyarakat justru sebaliknya informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat. Faktor ini karena sumber daya manusia belum dapat menunjang teknologi informasi.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Putri & Setiawan (2022) dan Diptyana (2019) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan IFR. Namun tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya

yang telah dilakukan oleh Masra & Sari (2020), Saraswati et al (2019) dan Priyastivi & Saputra (2019) yang mendapatkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR.

Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting (IFR)*

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan IFR. Hasil dari pengujian tersebut dibuktikan dengan nilai t - statistic 2,548 nilai tersebut $>1,96$ dan P-Values sebesar 0.011 yang memenuhi signifikansi <0.05 . Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetisi politik pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2017-2021 akan meningkatkan pengungkapan IFR. Tingginya kompetisi politik akan menaikkan tingkat kontrol dari para pesaing politiknya dan masyarakat pada pemerintah daerah.

Para pesaing politik akan selalu berupaya mengontrol kinerja pemerintah daerah melalui setiap kebijakan yang dibuat (Perdana & Achmad, 2018). Oleh karena itu pemerintah daerah akan bekerja dengan lebih profesional dan tidak mementingkan kepentingan golongan maupun pribadi. Hal ini sesuai dengan teori *steward* yang membuktikan bahwa *principal* sebagai pendorong struktur tata kelola yang memberdayakan dan memotivasi perilaku pro-organisasi *steward* akan menghasilkan peningkatan kinerja (Ghozali, 2020). Kemudahan akses IFR pada website resmi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa pemda telah memberikan hasil kinerja yang baik kepada para pengguna laporan keuangan. Sehingga pemerintah daerah memperoleh citra yang baik dan

memperoleh kepercayaan masyarakat dengan harapan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sofyani & Dwirama (2019), Pranaswati & Kriswanto (2020) dan Annisa & Murtini (2018) yang menyatakan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR. Namun tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Diptyana & Rokhmania (2018), Marseille & Aswar (2019) dan Yunita et al. (2022) yang mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa kompetisi politik tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan IFR.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja daerah dan kompetisi politik terhadap pengungkapan IFR di kabupaten/ kota di Jawa Barat pada tahun 2017-2021 dengan menggunakan 135 sampel. Dari hasil t -statistik penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan IFR yang berarti bahwa semakin tinggi belanja daerah maka akan menurunkan pengungkapan IFR. Sedangkan kesimpulan mengenai kompetisi politik terhadap pengungkapan IFR didapati bahwa kompetisi politik berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan IFR yang berarti bahwa kompetisi politik pemerintah daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan IFR.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen dan hanya menggunakan sampel pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya

menggunakan sampel pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat saja namun dapat menggunakan sampel penelitian pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang belum diteliti seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), kekayaan pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan aksesibilitas. Hal ini bertujuan agar mendapatkan model yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2(1), 2162–2184.
- Annisa, R., & Murtini, H. (2018). The Determinant of Regional Financial Information Transparency on the Official Website of Local Government. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 43–51. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i3.18213>
- Arifin, J. (2020). Domination of Regional Wealth as a Determining Factor of Financial Statement Disclosure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 91–104. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.91-104>
- Armandani, M. F., & Mulyadi, D. (2021). Digitalisasi Manajemen Sistem Dokumen Pengelolaan Perpustakaan Menggunakan QR Code Dan Digital Signature. *Jurnal Buana Ilmu*, 6(1), 13–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.36805/bi.v6i1.1981>
- Aronmwan, E. J., & Asiriuwa, O. (2018). Online financial disclosures in the Nigerian public sector. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 5(4), 257–270.
- Asnida, N., Irwansyah, I., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Fairness*, 8(3), 213–224. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15210>
- Astuti, R. P., & Pertiwi, I. F. P. (2022). The Influence of Local Government Size, Leverage, and Audit Opinion on Transparency of Regional Financial Reports with Internet Financial Reporting as an Intervening Variable. *Accounting and Finance Studies*, 2(4), 262–276. <https://doi.org/10.47153/afs24.5142022>
- Azis, I., & Hapsari, D. W. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Terhadap Internet Financial Reporting (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018). *E-Proceeding Of Management*, 7(2), 3262–3269.
- Dewi, V. I., & Adi, P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 358–366. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21322>
- Diptyana, P. (2019). Pengaruh faktor keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas internet financial reporting. *Jurnal Riset Akuntansi*

- Dan Keuangan*, 7(3), 513–530.
- Diptyana, P., & Rokhmania, A. (2018). Exploring government internet financial reporting in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 115–138.
- Finakesti, L., Aprianti, S., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1), 71–80.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi (Apriya (ed.))*. Yoga Pratama.
- Hadianto, D., & Murtin, A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) di Indonesia*. 4(2), 33–45.
- Hanafi, M., & Wadi, I. (2021). Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Kinerja keuangan, Internet Financial Reforting dan Opini Audit Pada Bagian Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 34–44.
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., Jannah, A., & Haryanto, M. Y. D. (2021). Digitalisasi Publikasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 19(1), 132–146.
- Indris, A. L. M., Surasni, N. K., & Irwan, M. (2018). The Determinant Disclosure Of Internet Financial Reporting In District And City Government In Indonesia. *Intrnasional Jjournal Resert*, 9(1), 62–74. www.ijeronline.com
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Statistik TPK Berdasarkan Wilayah*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah>
- Kurniati, S., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah , Jenis Pemerintahan , Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reporting. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–13.
- Lestari, E. P., & Rahardjo, S. N. (2020). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Pada Laman Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2018. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 9(3), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Marseille, C., & Aswar, K. (2019). An Investigation of Financial Statement Disclosure in Local Government Financial Statements. *International Journal of Business and Economic Affairs*, 4(6), 273–281. <https://doi.org/10.24088/ijbea-2019-46002>
- Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (IFR) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2656–3649. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/23>
- Mutiha, A. H. (2020). The Effect of Accessibility of Internet Financial Reporting on E-Government of Cities/Regencies in West Java. *3rd International Conference on Vocational Higher Education*, 426, 96–103.
- Mutmainnah, S., Nor, W., & Helmina, M. R. A. (2023). Determinan tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia. *Proceeding*

- of *National Conference on Accounting & Finance*, 5, 191–199. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art22>
- Nor, W., Safrida, L., Rizani, F., & Fitriaty, D. (2021). Transparansi Anggaran Pada Website Resmi Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1605–1624.
- Nufus, S. R. H., Herwanti, T., & Santoso, B. (2019). Pengaruh Ukuran Pemda, Leverage dan Kinerja Keuangan terhadap IFR pada Pemda dengan Dimoderasi Opini Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1012. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p08>
- Nur Probohudono, A., Supriyanto, S., & Mutiaranisa Kurniawati, E. (2021). The practice and determining factors of voluntary graphics disclosure in Local Government Financial Statements in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 14(2), 24–46. <https://doi.org/10.22452/ajap.vol14.no2.2>
- Pemda Jabar. (2022). *KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Indeks KIP Jabar Tertinggi, Lampau Nasional*. PORTAL JABARPROVGID. <https://jabarprov.go.id/berita/keterbukaan-informasi-publik-indeks-kip-jabar-tertinggi-lampau-nasional-6451>
- Perdana, P. P., & Achmad, K. (2018). Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Kompetensi Politik, Opini Audit Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(1), 1–21.
- Pranaswati, H. V., & Kriswanto. (2020). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 273–289.
- Priyastiwati, & Saputra, N. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Karakteristik Daerah Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(2), 157–172.
- Putri, W., & Setiawan, M. A. (2022). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(2), 438–448. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudibyo, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 85–101.
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4309>
- Sofyani, H., & Dwirama, V. (2019). Determinan Praktik Internet Reporting Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. *KOMPARTEMEN: JURNAL ILMIAH AKUNTANSI*, XVII(2), 158–168. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Sophi, D., & Mayar, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan

- Daerah Via Website*. 8(2), 79–89.
<https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i1.4757>
- Suryta, H. B., & Nugroho, R. A. (2022). E-Government Maturity Level Analysis (Study On 35 Government Website In Central Java). *Natapraja*, 10(1), 78–93.
<https://doi.org/10.21831/natapraja.v10i1.49072>
- Sutaryo, S., & Amanu, K. T. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43–60.
<https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619>
- Utami, R. D., Hapsari, D. W., & Mahardika, D. P. K. (2019). Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 16–23.
- Wahyuningsih, E., & Wijayanti, R. (2022). Meanwhile, government wealth has no effect on voluntary graphics disclosure in districts. *The International Journal of Business Management and Technology*, 6(4), 2017–2020. www.theijbmt.com
- Winangsih, A., & Fathah, R. N. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3299–3309.
- Yanti, & Nurlaelasari, E. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Berbasis WEB sebagai Transparansi dan Sinkronisasi dalam Pengelolaan BUMDES Kabupaten Karawang. *AKUISISI Jurnal Akuntansi*, 18(1), 74–85.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2421>
- Yuni, & Sari, V. F. (2022). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(3), 449–464.
<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Yunita, A., Wardhani, R. S., & Hamsani, H. (2022). Factors Affecting Disclosure of Internet Financial Reporting in The Government of The Bangka Belitung Islands. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 3(4), 717–730.
<https://doi.org/10.11594/ijmaber.03.04.21>